

Analisis Strategi Pengelolaan Pembiayaan dalam Anggaran Dana Pendidikan di SMK Negeri 1 Tekarang

Ilham¹, Nuraini Asriati²

^{1,2}Program Studi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Universitas Tanjungpura
*Corresponding Author e-mail: F2171231026

Article History

Received: 21-10-2024

Revised: 03-09-2024

Published: 06-12-2024

Key Words:

Financing, Education, Management, Strategy

Abstract: *The purpose of this study is to analyze the strategies used by SMK Negeri 1 Tekarang in planning, implementing (in this case using), and evaluating financing from two sources of education funds, namely BOS and PBP. This study uses a qualitative approach with a descriptive method obtained from a case study. Data collection through observation, interviews, and analyzing documents related to financing management at SMK Negeri 1 Tekarang. The findings show that financing management at SMK Negeri 1 Tekarang has been implemented in accordance with the principles of accountability and transparency. However, there are still several challenges such as limited financial resources and the many items that need to be met so that the budget seems small. This study provides recommendations to improve the effectiveness of cash management, including strengthening staff capacity and increasing collaboration with external stakeholders. The importance of this study is expected to help improve the quality of educational resource management in these schools and help them achieve better educational goals.*

Kata Kunci:

Pembiayaan, Pendidikan, Pengelolaan, Strategi

Abstrack: Tujuan pada penelitian ini yaitu menganalisis strategi yang digunakan SMK Negeri 1 Tekarang dalam merencanakan, melaksanakan (dalam hal ini menggunakan), serta mengevaluasi pembiayaan dari dua sumber dana pendidikan yaitu BOS dan PBP. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang diperoleh dari studi kasus. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta menganalisis dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan di SMK Negeri 1 Tekarang. Hasil temuan menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan di SMK Negeri I Tekarang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya finansial dan banyaknya pos-pos yang perlu dipenuhi sehingga anggaran terkesan sedikit. Studi ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kas, termasuk memperkuat kapasitas staf dan meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal. Pentingnya penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pendidikan di sekolah-sekolah tersebut dan membantu mereka mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik

PENDAHULUAN

Sektor Pendidikan merupakan Lembaga organisasi formal yang berperan penting untuk perkembangan Pembangunan bangsa. Di Indonesia sendiri, sistem pendidikannya masih dihantui oleh salah satu problematika klasik yaitu mengenai ketidakcocokan anggaran pembiayaan Pendidikan dengan kenyataan di lapangan. Karena itu, muncul keraguan oleh Masyarakat terhadap organisasi Pendidikan yang dianggap tidak professional sehingga mempengaruhi proses Pendidikan itu sendiri (Muftahu, 2020). Seluruh tahapan dalam Manajemen Pendidikan pada hakikatnya berdasarkan pada tercapainya tujuan Pendidikan, yang mana pembiayaan Pendidikan menjadi factor penentu keberhasilan kualitas Pendidikan, di antara faktor lain yang mendukung ketercapaian tujuan Pendidikan tersebut. Dari hal tersebut diatas, sudah semestinya pembiayaan dalam Pendidikan di atur dengan sedemikian rupa dan dipergunakan sesuai kebutuhan di Lembaga Pendidikan.

Pembiayaan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pendanaan Pendidikan menyatakan bahwa Biaya dalam sektor



Pendidikan seharusnya menjadi kewajiban bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Selain itu, anggaran dari pemerintah dalam sektor Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 Pasal 31 adalah sebesar 20% dari APBN dan APBD pada tahun anggaran berjalan. Artinya, pendanaan pemerintah di sektor pendidikan cukup besar (Rinawati, 2021).

Alokasi terhadap sumber daya yang berkaitan dengan pembiayaan disebut sebagai anggaran yang dipersiapkan dan dipergunakan untuk Lembaga Pendidikan pada periode tertentu. Snilstveit et al (2015), dalam penelitiannya menyatakan bahwa anggaran pendidikan yang disediakan tidak hanya dipergunakan untuk biaya operasional namun juga perlu dialokasikan guna investasi dalam kemajuan infrastruktur pendidikan, perubahan kurikulum, dan peningkatan Kompetensi guru.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori manajemen anggaran mulai berkembang pesat, dan promosi teori ilmu perilaku dan teori kontingensi secara bertahap juga memengaruhi metode manajemen anggaran. Metode manajemen anggaran telah menyerap teori keagenan ekonomi, serta keunggulan manajemen strategis dan psikologi sosial, dan menggabungkan yang terbaik dari seratus keluarga untuk menghadirkan pandangan yang makmur yang mengikuti perkembangan zaman (de Laat, 2017). Pada saat yang sama, manajemen anggaran juga telah dikembangkan secara ekstensif berdasarkan pada dasar teori dan metode (Marshall & Lambert, 2018).

Model pengelolaan anggaran keuangan perguruan tinggi dan universitas di negara maju juga layak dipelajari. Misalnya, model pengelolaan yang dianut sekolah negeri di Amerika Serikat adalah model pengelolaan terpusat.

Pengendalian sumber dana dan pengeluaran dilakukan oleh departemen terkait di tingkat sekolah, dan anggaran keuangan masing-masing perguruan tinggi harus dilaporkan ke sekolah terlebih dahulu dan disetujui, dan anggaran perguruan tinggi dimasukkan dalam anggaran tingkat sekolah. Setelah anggaran tingkat sekolah selesai, sekolah mengajukan anggaran kepada pemerintah negara bagian dan mengajukan alokasi anggaran. Sekolah dapat melaksanakan anggaran setelah pemerintah negara bagian menyetujuinya (Chessell & Negurita, 2020).

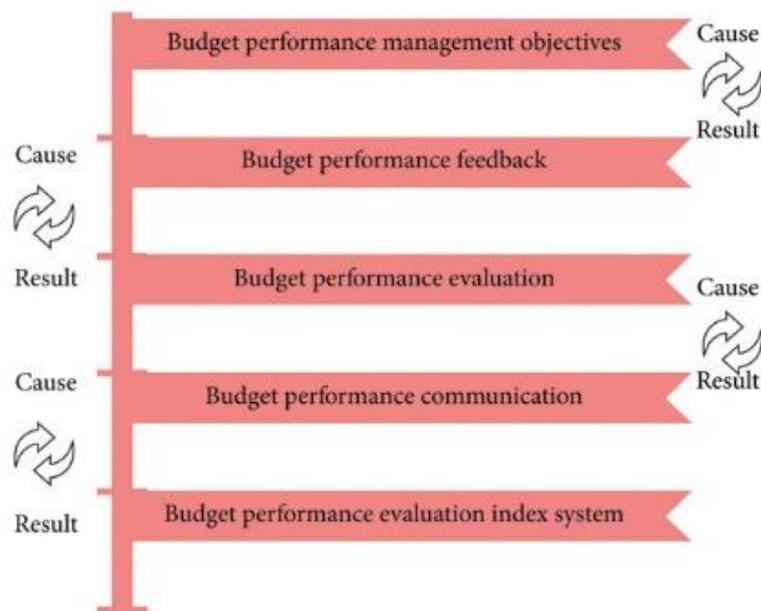
Contoh lainnya adalah Australia dan Selandia Baru. Perguruan tinggi dan universitas di kedua negara ini telah menjalankan manajemen anggaran yang ketat. Setiap proses penganggaran sangat ketat. Setelah sekolah mengeluarkan rancangan anggaran, rancangan tersebut perlu diumumkan ke seluruh sekolah untuk didengarkan oleh para guru dan siswa. Setelah pendapat diberikan, komite perguruan tinggi akan memverifikasi dan menyetujuinya sebelum dapat dilaksanakan. Selain itu, rancangan anggaran yang disetujui tidak memungkinkan siapa pun untuk mengubahnya. Jika perlu mengubahnya, rancangan tersebut harus disetujui sesuai dengan prosedur hukum tertentu. Selain itu, ketika mengawasi anggaran, anggaran tidak hanya diawasi oleh komite pelaksana anggaran, komite keuangan, dan guru serta siswa tetapi juga diawasi oleh berbagai entitas kepentingan publik, seperti kantor akuntan dan departemen audit terkait lainnya (Almuitairi, 2021).

Salah satu aspek penting dalam manajemen sekolah adalah manajemen keuangan, yang menentukan jalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Seperti halnya pengelolaan Pendidikan secara umum, Manajemen pembiayaan juga dilaksanakan melalui tahapan yang sama yaitu perencanaan, pelaksanaan (pengorganisasian, koordinasi, pengarahan), serta pengevaluasian sehingga dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukan dana yang cukup dan

tertib administrasi. Salah satu dana yang diberikan pemerintah kepada sekolah adalah Bantuan Operasional Sekolah atau yang biasa disebut dana BOS.

Sistem pengelolaan dana BOS telah berkembang dengan menggabungkan teknologi yang dikembangkan melalui Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah, yang biasa disebut ARKAS. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengembangkan inovasi ARKAS untuk memudahkan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh masing-masing lembaga Pendidikan (Rahayu, et al, 2024).

Evaluasi kinerja perhitungan merupakan penyebab umpan balik kinerja anggaran, dan umpan balik kinerja anggaran merupakan penyebab putaran berikutnya dari sistem indikator kinerja anggaran. Akibatnya, siklus tersebut berlanjut hingga tujuan peningkatan kinerja karyawan dan organisasi tercapai. Rantai sebab akibat dari sistem manajemen kinerja anggaran dapat ditunjukkan pada Gambar 1 dibawah ini



Gambar 1 Rantai Sebab Akibat dari Sistem Manajemen Kinerja Anggaran

Sumber: Li & Guo (2022, <https://doi.org/10.1155/2022/4758609>)

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa, adanya tujuan dalam manajemen perumusan anggaran menyebabkan dan menghasilkan umpan balik manajemen anggaran, begitu juga sebaliknya umpan balik manajemen anggaran dari organisasi dapat menjadi acuan dalam merumuskan tujuan perumusan anggaran. Selanjutnya umpan balik dari perumusan anggaran dapat menyebabkan dan menghasilkan komunikasi antar pengurus anggaran. Dimana pada akhirnya pengurus anggaran akan mengevaluasi perumusan anggaran dan menyesuaikan dengan tujuan organisasi semula.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Sutirman (2024) menyatakan bahwa Alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan yang efisien tidak hanya meningkatkan akuntabilitas kinerja sekolah tetapi juga memperkuat transparansi dalam pengelolaan dana. Respons survei, yang berkisar dari 0 (tidak setuju) hingga 1 (setuju) pada skala penilaian, menunjukkan persepsi positif terhadap praktik pengelolaan keuangan yang ada. Studi ini memberikan bukti empiris tentang pentingnya pengelolaan anggaran pendidikan yang baik sebagai alat untuk meningkatkan kualitas Pendidikan.

Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif melalui metode studi kasus. Apa yang terjadi dalam pengambilan data penelitian di lapangan dideskripsikan dalam penelitian ini tanpa ada penambahan dan pengurangan data (Abubakar, 2021; Creswell, 2014). SMK Negeri 1 Tekarang dipilih sebagai Lokasi penelitian dalam penelitian ini. Subjek yang dipilih yaitu orang yang mengetahui pasti terkait pengelolaan pembiayaan pendidikan di SMK Negeri 1 Tekarang, yaitu Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, Wakil Kepala Bagian Kurikulum, Wakil Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Bendahara BOS, dan Bendahara PBP. Teknik analisis data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi berupa dokumen pembiayaan dan foto.

Peneliti mewawancarai dan mengamati orang-orang yang diyakini mempunyai pengetahuan tentang kondisi objek yang diteliti. Selain itu, peneliti juga dapat memasukkan informasi dari literatur yang tersedia untuk dijadikan bahan pertimbangan penelitian, atau memperoleh informasi tambahan dengan memperoleh informasi tambahan dari berbagai sumber yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Dalam ekstraksi data, penulis menggunakan beberapa alat berupa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 1) observasi; Dalam metode ini, peneliti melakukan survei lapangan untuk mengumpulkan data. 2) Wawancara Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan manajer keuangan SMK Negeri 1 Tekarang dan bertukar informasi mengenai permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan keuangan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Definisi Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Pengertian Pengelolaan dalam Bahasa asing (inggris) dikenal dengan kata “manage” yang memiliki makna “mengatur, mengelola, mengurus, dan melaksanakan”. Definisi lainnya dari kata pengelolaan berarti sebuah tahapan unik yang mencakup beberapa hal yaitu perencanaan, pengorganisasian, Langkah, dan pengawasan guna membentuk dan mencapai tujuan yang didasarkan pada Sumber Daya yang ada (Ferdinand, 2019).

Sementara kata pembiayaan adalah sumber keuangan yang mana diperlukan untuk menunjang efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Pendidikan (Arwildayanto et al., 2017). Dari dua pengertian diatas dapat peneliti kemudian memberikan kesimpulan tentang pengelolaan pembiayaan Pendidikan yang bermakna seluruh kegiatan di dalam suatu Lembaga Pendidikan (dalam hal ini sekolah) yang melalui tahapan seperti perencanaan, pengorganisasian, tahapan, dan pengawasan.

Mengingat pentingnya sumber daya bagi sekolah, diperlukan tinjauan mendalam terhadap pembiayaan sekolah dan proses pengelolaan pembiayaan. Pembiayaan harus memiliki dasar hukum dan prosedur pengeluaran. Pengelolaan pembiayaan, serta pembiayaan itu sendiri, memerlukan pengambilan tanggung jawab hukum (Ozbal, 2017).

Biaya pendidikan yang disediakan oleh pemerintah dapat disalurkan dalam bentuk beasiswa, biaya operasional sekolah, dana pengembangan sarana sekolah, biaya sertifikasi pendidik, dan masih banyak lagi (Amalia, 2021).

b. Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Negeri 1 Tekarang

Sebagai sebuah sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) SMK Negeri I Tekarang diharuskan mengikuti panduan dan petunjuk penggunaan dana bantuan oprasional sekolah (BOS) dan Pembiayaan Beasiswa Pendidikan (PBP) sesuai yang diatur oleh KEMENDIKBUD untuk mewujudkan visi SMK Negeri I

Tekarang sebagai SMK yang unggul dan bermutu, tidak kalah pentingnya juga mewujudkan pengelolaan dana pendidikan secara benar untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikut ini uraian tentang pengelolaan Dana BOS dan PBP di SMK Negeri I Tekarang.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan yang berfungsi dalam mempersiapkan program yang akan dilaksanakan secara terstruktur guna mencapai tujuan dari program tersebut. Perencanaan dana bantuan operasional sekolah merupakan langkah yang harus dilaksanakan, perencanaan dana bantuan operasional di sekolah SMK Negeri I Tekarang diawali dengan rapat kepala sekolah dan para guru serta tenaga kependidikan untuk menentukan rencana kegiatan sekolah dan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah atau biasa dinamakan RAPBS.

2. Pelaksanaan

Implementasi BOS dan PBP merupakan langkah selanjutnya dalam proses perencanaan. Proses pelaksanaan dana BOS dan PBP dimulai dari pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan pelaporan dana BOS dan PBP. Hibah BOS dan PBP diberikan kepada penerima atas prestasi akademik selama setahun penuh. Hibah BOS disalurkan setiap 3 bulan. Penyaluran dana BOS dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan penyaluran dana PBP dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Uraian di atas menunjukkan proses penyaluran dana BOS dan PBP, dimana dana BOS disalurkan melalui Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, sedangkan dana PBP disalurkan melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan terakhir dilakukan penyaluran melalui tata cara pendistribusian BOS dan PBP ke SMK Negeri I Tekarang. Semua biaya administrasi ditanggung oleh pemerintah. Penyaluran dana BOS dan PBP tidak dibayarkan secara penuh, melainkan dibagi menjadi dua bagian, yakni setiap tiga bulan sekali. Hal ini sesuai dengan petunjuk teknis BOS dan PBP.

Penggunaan dana BOS dan PBP di SMK Negeri 1 Tekarang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan disepakati bersama pada saat rapat perencanaan di RAPBS. Pihak sekolah akan menambah dana untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, agar pembangunan sekolah yang berkualitas harus didukung kapasitas guru yang berkualitas.

3. Monitoring

Monitoring merupakan ukuran berhasil atau tidaknya program yang direncanakan terlaksana, pemantauan BOS dan PBP di SMK Negeri 1 Tekarang meliputi pemantauan internal dan eksternal serta masyarakat. Kementerian Pendidikan mengawasinya. Selain itu pemeriksaan juga dilakukan oleh tim pemeriksaan pada instansi ketenagakerjaan dalam hal ini oleh Irjen Kementerian Republik Indonesia dan Badan Pengawasan dan Pengembangan Keuangan (BPKP) dan Kantor Audit (BPK).

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemantauan dana BOS dan PBP di SMK Negeri 1 Tekarang sudah sesuai dengan metode pemantauannya. Sejauh ini tidak ada keluhan dari masyarakat terkait penyalahgunaan penggunaan dana BOS dan PBP. Bahkan dalam berbagai kegiatan, komite dan orang tua beserta sekolah dilibatkan dalam membantu kegiatan akademik di SMK Negeri 1 Tekarang dengan melibatkan aturan dan hasil perundingan bersama.

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan di SMK Negeri I Tekarang telah memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Meskipun demikian, terdapat banyak tantangan, termasuk terbatasnya sumber daya keuangan dan kurangnya pelatihan bagi staf manajemen keuangan. Selain itu, untuk menjawab tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta memperkuat kerja sama dengan pihak eksternal hingga memperluas hubungan yang dapat menjadi sumber daya finansial. Selain itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan untuk memastikan anggaran pelatihan dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan. Dengan memperbaiki dan memperbaiki pengelolaan keuangan maka SMK Negeri I Tekarang akan mampu mengelola anggaran pendidikan yang pada akhirnya akan menunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian* (1st Ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Almutairi, B. L. S. (2021). Impact of COVID-19 on Accounting Profession from The Perspective of A Sample of Head of Accounting Departments Within KUWAITI Manufacturing Sector. *Psychology and Education Journal*, 58(2), 4758-4768. Doi: <https://doi.org/10.17762/pae.v58i2.2867>.
- Arwildayanto, Lamatenggo, N., & Sumar, W. T. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan* (1st ed.). Widya Padjadjaran.
- Astuti, D., & Sutirman, I. (2024). Analysis of the Effect of Education Fund Budget on Performance Accountability and Transparency in School Fund Management (Cirebon City). *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(8), 3143-3156. Doi: <https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i8.10441>
- Chessell, D., & Neguriță, O. (2020). Smart Industrial Value Creation, Cyber-Physical Production Networks, And Real-Time Big Data Analytics in Sustainable Internet Of Things-Based Manufacturing Systems. *Journal of Self-Governance and Management Economics*, 8(4), 49-58.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- de Laat, P. B. (2017). Big data and algorithmic decision-making: can transparency restore accountability. *Acm Sigcas Computers and Society*, 47(3), 39-53. Doi: <https://doi.org/10.1145/3144592.3144597>
- Ferdinand, A. (2019). *Metode Penelitian Manajemen*. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indra, A., Suparman, S., & Najamuddin, N. (2023). Integration of MARKAS and ARKAS Application in BOS Fund Budget Management at the Elementary School Level, West Sumbawa Regency. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 8(4), 1412-1421.
- Marshall, T. E., & Lambert, S. L. (2018). Cloud-based intelligent accounting applications: accounting task automation using IBM watson cognitive computing. *Journal of emerging technologies in accounting*, 15(1), 199-215. Doi: <https://doi.org/10.2308/jeta-52095>
- Muftahu, M. (2020). Higher Education and Covid-19 Pandemic: Matters Arising and the Challenges of Sustaining Academic Programs in Developing African

- Universities. *International Journal of Educational Research Review*, 417–423. <https://doi.org/10.24331/ijere.776470>
- Rahayu, N. M. P., Wirata, G., & Astawa, I. W. (2024). Effectiveness of the use of the school budget activity plan application in managing school operational assistance funds at Elementary School Number 1 Abiansema in 2024. *Priviet Social Sciences Journal*, 4(8), 1-6.
- Rinawati. (2021). Education Financial Management during Covid-19 Pandemic of Islamic Universities in South Kalimantan. *Dinamika Ilmu*, 21(2), 383-396, doi: <http://doi.org/10.21093/di.v21i2.3607>
- Snilstveit, B., Stevenson, J., Phillips, D., Vojtkova, M., Gallagher, E., Schmidt, T., Jobs, H., Geelen, M., Pastorello, M. G., & et al. (2015). The Impact of Education Programmes on Learning and School Participation in Low-and Middle-Income Countries. 3ie Systematic Review Summary 7. International Initiative for Impact Evaluation, September 2016. https://www.3ieimpact.org/sites/default/files/2019-05/SR24-education-review_2.pdf
- Özbal, E. Ö. (2017). A Comparative Analysis of Budget Management In General High Schools. *Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 7(2), 133-151.
- Amalia, A. P. (2021). education budget management, new public management and the COVID-19 Pandemic. *Dinamika Pendidikan*, 16(1), 1-11.



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)